

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Nagari (BKN) Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk membantu kemudahan akses permodalan bagi Rumah Tangga Miskin. Program SPP ini memiliki sifat mudah, cepat dan lestari. Sedangkan prinsip yang dimiliki oleh Program SPP ini adalah Keberpihakan terhadap Rumah Tangga Miskin, Transparansi, Partisipasi, Desentralisasi, Akuntabilitas Keberlanjutan dan Kesenjangan Gender.

Manajemen Program Simpan Pinjam Perempuan Oleh Badan Kerjasama Nagari Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat telah dijalankan secara keseluruhan, dapat dilihat dari proses manajemen yang dikemukakan oleh John F. Mee mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi dan pengawasan. Namun dalam menjalankan proses manajemen Program Simpan Pinjam Perempuan Oleh Badan Kerjasama Nagari Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat masih terdapat masalah dan kekurangan dalam menjalankannya.

Pada perencanaan program SPP telah dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program. Yang mana dapat dilihat dari penetapan tujuan yang jelas, jelasnya aktor yang terlibat dalam penetapan tujuan dan tujuan yang tidak menyimpang dari UU yang berlaku. Begitu juga dengan sumber-sumber yang diperlukan sudah terlihat jelas rencana dalam perekrutan SDM yang terstruktur dan

aktor-aktor yang melaksanakan program SPP sudah jelas walaupun masih merasakan kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pembinaan serta kurangnya dana yang berimbas terhadap antrian yang panjang pada pencairan dana terhadap kelompok SPP akan tetapi dari segi waktu pelaksanaan Program SPP ini sudah jelas dan sudah ditentukan sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing. Begitu juga halnya dengan menentukan organisasi, metode dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan program SPP ini.

Pengorganisasian yang meliputi penentuan kegiatan. Pengelompokan kegiatan, pendelegasian kewenangan dan peranan perorangan. Pada proses ini penentuan kegiatan telah dilakukan dengan jelas oleh BKN. Terlihat dari penentuan kegiatan-kegiatan yang terstruktur yang sesuai dengan tujuan Program. Pengelompokan kegiatan berdasarkan tupoksi yang dimiliki masing-masing bidang. Pendelegasian wewenang yang diberikan oleh ketua BKN kepada Ketua Masing-masing Bidang dan dari ketua bidang kepada anggota bidang. Serta peranan perorangan yang telah ditetapkan secara jelas berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Motivasi pada pelaksanaan program SPP ini, BKN telah memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan kepada pelaksana program. Begitu juga dengan halnya motivasi bentuk hukuman, BKN telah menyediakan hukuman bagi pelanggar mulai dari pelaksana program dan juga terhadap sasaran program. Yang menjadi permasalahan disini adalah dimana BKN hanya memberikan penghargaan kepada bidang UPK saja, namun terhadap bidang BP UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Tim Penyehat pinjaman belum ada motivasi bentuk penghargaan

yang diberikan, sedangkan untuk sanksi yang akan diterima diterapkan secara merata. Untuk kelompok sasaran sendiri BKN hanya memberikan motivasi penghargaan berupa mempermudah kelompok untuk melakukan peminjaman selanjutnya. Sedangkan motivasi hukuman berupa sanksi telah ditetapkan kepada kelompok SPP.

Proses pengawasan yang terdiri dari observasi dan pengamatan, pelaporan dan pembatasan kewenangan. Semua bentuk pengawasan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh BKN dalam menjalankan program SPP. Hal ini terlihat dari bentuk pengawasan observasi yang dilakukan secara tiba-tiba oleh atasan dan dilakukan secara menyeluruh. Begitu juga dengan halnya pengawasan dalam bentuk pelaporan yang telah dilakukan oleh masing-masing bidang yang terkait dalam pelaksanaan program SPP termasuk laporan-laporan dari kelompok SPP setiap bulannya. Sedangkan pengawasan dari pembatasan wewenang sendiri dapat dilihat dari jelasnya pembatasan wewenang yang dilakukan dari atasan kepada bawahan, dan belum ada terjadi penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing bidang.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam sebuah pelaksanaan sangat diperlukan adanya ketersediaan dana yang cukup sehingga kekurangan dana tidak menghambat kegiatan

program. Pada penelitian ini diharapkan BKN dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu menambah anggaran program SPP.

2. Kualitas sumberdaya manusia harus lebih ditingkatkan supaya dapat menjalankan program secara maksimal.
3. Pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga kerja maupun kelompok sasaran perlu adanya pengaturan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kelompok SPP.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan pedoman dan memperkaya bahan kepustakaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik tentang program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

